

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Praktik Manajemen Laba Riil Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia

Indriyani Dwi Putri¹, Supatmi^{2*}

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

232018090@student.uksw.edu, supatmi.supatmi@uksw.edu

*Corresponding Author

Diajukan : 31 Mei 2022

Disetujui : 2 Juni 2022

Dipublikasi : 4 Juli 2022

ABSTRACT

Earnings management makes the profit information reported by the company in the financial statements not of good quality. One of the factors that influence earnings management is political connection. This study aims to analyze the effect of political connections on earnings management practices in manufacturing companies. The sample of this study was 153 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2018-2020 period with a total of 459 observations. Earnings management in this study was measured by real earnings management, namely abnormal CFO, abnormal discretionary expense, and abnormal production. Political connection is measured by the number of boards in the company, both the board of directors and the board of commissioners, who are politically connected. The research hypotheses were tested using panel data regression analysis techniques. The results showed that the politically connected board of commissioners has a positive effect on earnings management as measured by abnormal discretionary expense and a negative effect through the measurement of abnormal production. Politically connected board of commissioners has no effect on earnings management through abnormal measurement of CFO. Meanwhile, the politically connected board of directors was found to have no effect on earnings management, either by measuring abnormal CFO, abnormal discretionary expense, or abnormal production. The research findings confirm the application of agency theory that political connections within the company, especially politically connected boards, affect the company's earnings management practices.

Keywords: Board of commissioner; Board of director; Manufacturing; Political Connection; Real Earnings Management

PENDAHULUAN

Indikator keberhasilan suatu perusahaan yang menjadi sorotan pemangku kepentingan yaitu tingkat laba yang dilaporkan perusahaan. Laba adalah tolak ukur kinerja perusahaan, dimana perusahaan dituntut untuk menjaga kualitas pelaporan laba (Karina, 2020). Sehingga dapat memberikan informasi yang handal, relevan dan memadai bagi berbagai pihak berkepentingan. Manajemen laba menjadikan informasi laba yang dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangan tidak berkualitas. Seperti di Indonesia, salah satu kasus manajemen laba terjadi pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dimana KAP Ernst & Young Indonesia menduga telah terjadi penggelembungan sebesar Rp4 triliun oleh manajemen lama pada laporan keuangan perusahaan tahun 2017. Laporan keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun 2017 disajikan kembali pada tahun 2020, termasuk laporan keuangan 2018 dan 2019 yang pada saat itu belum dilaporkan. Perusahaan mencatat rugi bersih sebesar Rp5,23 triliun selama 2017 pada laporan keuangan yang disajikan kembali tersebut. Jumlah tersebut lebih besar Rp4,68 triliun dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya rugi Rp551,9 miliar. Hal ini membenarkan dugaan KAP Ernst & Young Indonesia sekaligus membuktikan bahwa terdapat praktik manajemen laba

yang dilakukan oleh manajemen lama perusahaan tersebut, yaitu dengan menaikkan laba (menurunkan rugi) yang dilaporkan dari laba (rugi) yang sesungguhnya sehingga rugi yang dialami oleh perusahaan terlihat lebih dan rendah (Wareza, 2019).

Koneksi politik merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi tindakan manajemen laba (Chaney *et al.*, 2010). Lebih lanjut dinyatakan bahwa salah satu keuntungan perusahaan dengan koneksi politik adalah adanya perlindungan dari politisi bagi perusahaan sebagai tempat berinvestasi sehingga manajer tidak harus terlalu memperhatikan kualitas pelaporan keuangan. Koneksi politik sudah sering terjadi di negara-negara berkembang, salah satunya di Indonesia (Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Dalam penelitian Hidayati & Diyanty (2018) menyatakan bahwa terdapat fenomena payung politik yang berarti para pelaku bisnis dengan sengaja menjalin koneksi politik untuk mengamankan dan memudahkan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Fenomena koneksi politik di Indonesia sudah dilakukan pada struktur organisasi perusahaan BUMN yaitu sejak kepemimpinan presiden Soeharto hingga presiden Joko Widodo dalam pergantian komisaris BUMN (Fitiasari & Suwandi, 2020). Perusahaan akan mendapatkan banyak keuntungan apabila memiliki koneksi politik, termasuk adanya perlindungan dari politisi bagi perusahaan sebagai tempat berinvestasi sehingga manajer tidak harus terlalu memperhatikan kualitas pelaporan keuangan (Chaney *et al.*, 2010).

Penelitian Chaney *et al.* (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kualitas laba yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik dengan menggunakan sampel sebanyak 19 negara. Hasil penelitian Apriyani *et al.* (2013) menunjukkan bahwa dewan komisaris yang terkoneksi politik pada perusahaan BUMN dan perusahaan swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian Matangkin & Mardiana (2018) pada perusahaan *go public* di Indonesia menunjukkan koneksi politik berpengaruh positif terhadap meningkatnya praktik kecurangan pelaporan keuangan. Namun, Puspitasari & Nugrahanti (2016) koneksi politik tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Antonius & Tampubolon (2019) bahwa koneksi politik tidak berpengaruh pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian Attia *et al.* (2016) pada perusahaan Tunisia, berdasarkan uji univariat dan multivariat juga menunjukkan bahwa koneksi politik tidak secara langsung berkaitan dengan manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas, hasil dari penelitian pengaruh koneksi politik terhadap manajemen laba masih bervariasi. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis kembali pengaruh koneksi politik terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020. Penelitian terkait manajemen laba di Indonesia cenderung berfokus pada manajemen laba akrual dan penelitian ini akan diukur menggunakan manajemen laba riil. Menurut Roychowdhury (2006) manajemen laba riil merupakan penyimpangan dari aktivitas operasional normal yang dimotivasi oleh keinginan manajer untuk memenuhi tujuan laba tertentu. Menurut Braam *et al.* (2015) perusahaan yang terkoneksi politik akan lebih rentan melakukan tindakan manajemen laba riil dibandingkan manajemen laba akrual. Hal ini disebabkan perusahaan terkoneksi politik akan memperoleh pengawasan yang lebih ketat dari publik, dengan demikian risiko deteksi menjadi tinggi sehingga perusahaan lebih memilih manajemen laba riil agar sulit terdeteksi. Pada penelitian ini koneksi politik diukur menggunakan jumlah dewan dalam perusahaan, baik dewan direksi maupun dewan komisaris, yang memiliki koneksi politik (Supatmi, 2020) yang lebih mampu menunjukkan dampak pengaruh koneksi politik terhadap variabel lain daripada sekedar pengukuran keberadaan koneksi politik saja.

STUDI LITERATUR

Teori Agensi

Teori keagenan mengungkapkan hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen). Teori keagenan mendefinisikan teori agensi sebagai kontrak antara pemegang saham (*principal*) yang mempekerjakan manajemen (agen) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan pada manajer, maka terjadi hubungan keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi

karena agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga dapat memicu biaya keagenan (*agency cost*) (Agustia, 2013), salah satunya adanya praktik manajemen laba. Dari sudut pandang teori agensi, manajemen laba merupakan salah satu contoh konflik yang timbul diantara pemegang saham dan manajemen karena adanya asimetri informasi, yaitu dimana manajemen memiliki informasi yang lebih dibandingkan pemegang saham terkait kondisi dalam perusahaan (Mahawyaharti & Budiasih, 2016). Salah satu cara untuk mengurangi praktik manajemen laba adalah dengan pengaturan komposisi dewan dalam perusahaan, yaitu keberadaan dewan komisaris yang independen. Namun ketika dewan tersebut terkoneksi politik, teori agensi memandang koneksi politik memiliki dampak negatif (Ling *et al.*, 2016) yaitu semakin mempertajam konflik agensi yang terjadi. Perusahaan yang terkoneksi politik berisiko tinggi untuk mengalami kegagalan bisnis (Supatmi *et al.*, 2021).

Manajemen Laba Riil

Menurut Fischer & Rosenzweig (1995) manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan manajemen perusahaan untuk mengurangi atau menambah laba tanpa menimbulkan penurunan atau kenaikan keuntungan ekonomi perusahaan dalam waktu yang lama. Dalam perusahaan, manajemen dapat melakukan dua praktik manajemen laba yaitu manajemen laba riil dan manajemen laba akrual. Manajemen laba akrual sering diprosikan dengan *discretionary accruals* yang menurut Sulistyanto (2008) bahwa *discretionary accruals* menggunakan komponen akrual dalam mengelola laba karena komponen akrual tidak membutuhkan bukti kas fisik sehingga tidak perlu disertai kas diterima atau dikeluarkan. Sedangkan menurut Roychowdhury (2006) pengukuran manajemen laba riil menggunakan 3 proksi, yaitu:

1. *Abnormal Cash Flow Operations* (Manipulasi Penjualan)
Manipulasi laba yang dilakukan perusahaan dengan memberikan diskon harga atau kemudahan persyaratan kredit.
2. *Abnormal Discretionary Expenses* (Pengurangan Biaya Diskresioner)
Manajemen laba riil dilakukan dengan mengurangi biaya penelitian dan pengembangan, biaya iklan, biaya penjualan, administrasi dan umum.
3. *Abnormal Production Costs* (Produksi yang Berlebihan)
Manajemen laba riil yang dilakukan melalui manipulasi biaya produksi, perusahaan akan memiliki biaya produksi lebih tinggi daripada level normalnya.

Koneksi Politik

Sebuah perusahaan dianggap terkoneksi politik apabila setidaknya satu pemegang saham utama (orang yang memiliki setidaknya 10 persen dari total hak suara) atau salah satu dari pejabat tinggi (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri atau memiliki hubungan erat dengan atasan politisi atau partai politik (Faccio, 2006). Oleh karena itu, dewan terkoneksi politik dapat dikatakan sebagai dewan perusahaan yang pernah atau sedang menjabat sebagai anggota parlemen, menteri, perwira militer senior, atau orang yang berhubungan erat dengan politisi atau partai politik. Menurut Chaney *et al.* (2010) terdapat keuntungan bagi perusahaan yang memiliki koneksi politik, yaitu pada saat kualitas laba perusahaan rendah maka perusahaan tersebut akan berusaha menjalin koneksi politik agar memperoleh pengamanan.

Koneksi Politik Terhadap Manajemen Laba Riil

Aktivitas manajemen laba dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diduga salah satunya adalah koneksi politik dalam perusahaan (Hendi & Ningsih, 2019). Perusahaan akan diawasi dengan ketat oleh publik jika terkoneksi politik. Oleh karena itu koneksi politik yang dimiliki seharusnya dapat mengurangi aktivitas manajemen laba (Chaney *et al.*, 2010). Adanya kondisi tersebut, manajer dimungkinkan melakukan praktik manajemen laba dan menggunakan cara yang sulit dideteksi publik ataupun rekan politik, salah satunya menggunakan manajemen laba riil.

Dewan perusahaan adalah pihak yang berhubungan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan, dengan demikian dewan yang terhubung secara politik juga akan berimbas terhadap kegiatan operasional dan kinerja perusahaan (Putri & Supatmi, 2020). Dewan

direksi memiliki peran penting, yaitu menentukan kebijakan yang akan dijalankan perusahaan (Habib *et al.*, 2017). Dewan direksi yang terkoneksi politik dapat melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan pemegang saham. Tindakan tersebut berupa pemilihan investasi yang tidak benar, pengeluaran diluar kegiatan operasional perusahaan, dan praktik keagenan yang dapat menguntungkan pemilik saham terkait koneksi politik (Wulandari, 2018). Sedangkan dewan komisaris bertugas untuk bertanggung jawab mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi (Habib *et al.*, 2017). Semakin banyak anggota dewan komisaris pada perusahaan, maka akan kesulitan dalam menjalankan pengawasan dan mengendalikan tindakan dari manajemen sehingga dapat memperburuk kinerja perusahaan (Agustia, 2013). Dengan demikian, hal ini dapat mendorong praktik manajemen laba pada perusahaan.

Penelitian Chaney *et al.* (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kualitas laba yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Lebih lanjut, hasil penelitian tersebut membuktikan perusahaan yang terkoneksi politik memiliki tujuan melakukan praktik manajemen laba untuk membatasi tekanan dari pasar. Sejalan dengan hasil penelitian Apriyani *et al.* (2013) menunjukkan bahwa dewan komisaris terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada 16 perusahaan BUMN dan 19 perusahaan swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris perusahaan yang terkoneksi politik lebih menjurus melakukan tindakan manajemen laba. Penelitian Braam *et al.* (2015) juga menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan publik 30 negara. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi koneksi politik yang dimiliki dewan maka semakin tinggi tingkat manajemen laba pada perusahaan. Berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1a: Dewan komisaris terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba riil

H1b: Dewan direksi terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba riil

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Laporan tahunan diperoleh dari *website* www.idx.co.id atau situs resmi perusahaan. Industri keuangan dikeluarkan dari sampel karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri nonkeuangan, yaitu tidak bergerak pada kegiatan produksi barang sehingga kurang relevan untuk pengukuran manajemen laba riil yang dilakukan melalui produksi yang berlebihan atau manipulasi biaya produksi (Roychowdhury, 2006). Sampel penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria seperti berikut ini:

Tabel 1. Penentuan Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 – 2020.	191
2	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan periode tahun 2018 – 2020.	(32)
3	Perusahaan yang tanggal berakhirnya laporan keuangan bukan 31 Desember selama periode tahun 2018 – 2020.	(2)
4	Perusahaan yang tidak menyediakan data yang lengkap pada tahun 2018 - 2020.	(4)
Jumlah sampel akhir		153

Sumber: Data diolah, 2022

Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang mencakup beberapa sektor, yakni barang konsumsi, industri dasar dan kimia, dan aneka industri. Berdasarkan kriteria diatas,

diperoleh 153 perusahaan sebagai sampel dengan jumlah observasi 459. Berikut sebaran jumlah observasi per sektor:

Tabel 2. Sebaran Perusahaan Manufaktur Per Sektor

No	Sektor	Jumlah Sampel	Jumlah Obsevasi
1	Barang Konsumsi	49	147
2	Industri Dasar dan Kimia	67	201
3	Aneka Industri	37	111
Total		153	459

Sumber: Bursa Efek Indonesia 2022

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba riil. Manajemen laba riil (ML) dalam penelitian ini diukur dengan tiga cara sesuai dengan pendekatan Roychowdhury (2006), yaitu:

1. *Abnormal Cash Flow Operations* (Manipulasi Penjualan)

$$\frac{CFO_t}{A_{t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{S_t}{A_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{\Delta S_t}{A_{t-1}} \right) + \varepsilon_t$$

Keterangan:

CFO_t : Arus kas operasi perusahaan i pada tahun t

A_{t-1} : Total aset perusahaan i pada tahun t-1

S_t : Penjualan total perusahaan i selama tahun t

2. *Abnormal Discretionary Expenses* (Pengurangan Biaya Diskresioner)

$$\frac{DISEXP_t}{A_{t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{S_{t-1}}{A_{t-1}} \right) + \varepsilon_t$$

Keterangan:

DISEXP : Biaya iklan ditambah dengan biaya penelitian dan pengembangan, ditambah biaya penjualan serta biaya admisnistrasi dan umum.

3. *Abnormal Production Costs* (Produksi yang Berlebihan)

$$\frac{PROD_t}{A_{t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{S_t}{A_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{\Delta S_t}{A_{t-1}} \right) + \varepsilon_t$$

Keterangan:

$PROD_t$: Harga pokok penjualan ditambah perubahan persediaan.

Pengukuran manajemen laba riil diperoleh dari nilai *error* (ε_t) setiap rumus regresi di atas (Roychowdhury, 2006). Dimana semakin tinggi nilai *error* maka semakin tinggi pula perusahaan melakukan tindakan manajemen laba riil berdasarkan pengukuran *abnormal CFO*, *abnormal discretionary expenses*, dan *abnormal production*.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah koneksi politik. Koneksi politik diukur dengan menghitung jumlah dewan yang ada diperusahaan, baik dewan direksi (DD) dan dewan komisaris (DK) yang terkoneksi politik. Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan dewan terkoneksi politik menggunakan acuan (Supatmi, 2020) yang mengadopsi dari (Faccio *et al.*, 2006; Faccio, 2006; Wu *et al.*, 2012; Habib *et al.*, 2017), diantaranya anggota dewan yang sedang menjabat atau mantan presiden, parlemen, militer, pejabat kementerian, pimpinan pemerintah daerah, lembaga pemerintahan lainnya, atau memiliki keterikatan keluarga serta hubungan rekan dengan partai atau politisi. Penelitian ini juga menggunakan hasil penelitian terdahulu sebagai acuan apabila terdapat seorang atau perusahaan yang terkoneksi politik

Variabel kontrol dalam penelitian ini, yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, kualitas audit. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dihitung melalui logaritma natural dari total aset (Wiranata & Nugrahanti, 2013). Ukuran perusahaan (UP) pada umumnya dikaitkan dengan kemapanan perusahaan (Akbar, 2013). Apabila semakin besar ukuran perusahaan maka kemampuan untuk melakukan manajemen laba juga akan semakin tinggi (Sucipto & Zulfa, 2021). Kemudian, *leverage* (LV) dihitung dengan membagi total kewajiban dengan total aset (Supatmi,

2020). Jika tingkat rasio *leverage* pada perusahaan tinggi maka proporsi kewajibannya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi dari asetnya, sehingga cenderung melakukan praktik manajemen laba (Agustia, 2013). Lalu, kualitas audit (KA) diukur menggunakan variabel dummy, dengan memberikan skor 1 jika diaudit oleh KAP *Big Four* dan skor 0 jika diaudit oleh KAP lainnya (Gerayli *et al.*, 2011). Selain itu, penelitian ini menambahkan variabel kontrol untuk mengakomodasi kondisi pandemi *Covid-19* (TP). Data tahun 2020 akan diberi skor 1 dan data tahun 2018-2019 diberi skor 0.

Hipotesis penelitian ini menggunakan uji regresi data panel dengan program pengolahan data *Eviews 9* yang ditunjukkan dengan persamaan regresi berikut:

$$MLit = \alpha + \beta_1 DKit + \beta_2 DDit + \beta_3 UPit + \beta_4 LVit + \beta_5 KAit + \beta_6 TPit + \epsilon it$$

HASIL

Sebaran data penelitian untuk masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev.
ABCFO	-2.18E-08	4,823	-3,473	0,997
ABDISEXP	-1.96E-07	5,554	-1,747	0,998
ABPROD	4.36E-08	5,628	-4,313	0,997
DD	0,010	0,500	0,000	0,051
DK	0,886	0,666	0,000	0,150
LV	0,515	5,167	0,003	0,471
UP	28,534	33,494	25,310	1,581

Variabel penelitian	Jumlah	Proporsi
Kualitas Audit (KA)		
KAP <i>Big Four</i> (1)	156	33,98%
Non KAP <i>Big Four</i> (0)	303	66,01%
Tahun Pandemi (TP)		
Periode pandemi 2020 (1)	153	33,33%
Sebelum Pandemi 2018-2019 (0)	306	66,67%

Keterangan:

ABCFO: *Abnormal CFO*; ABDISEXP: *Abnormal discretionary expense*; ABPROD: *Abnormal Production*; DK: Dewan komisaris terkoneksi politik; DD: Dewan direksi terkoneksi politik; UP: Ukuran perusahaan; LV: *Leverage*; KA: Kualitas Audit; TP: Tahun pandemi.

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3, *abnormal discretionary expense* memiliki nilai rata – rata lebih besar dibandingkan dengan *abnormal CFO* dan *abnormal production*. Hal ini mencerminkan bahwa tindakan manajemen laba riil pada perusahaan manufaktur cenderung menggunakan *abnormal discretionary expense* daripada menggunakan *abnormal CFO* dan *abnormal production*. Jumlah dewan yang terkoneksi politik di industri manufaktur selama periode 2018-2020 tergolong rendah. Akan tetapi jumlah dewan komisaris yang terkoneksi politik lebih tinggi dibandingkan jumlah dewan direksi yang memiliki koneksi politik. Hal ini dikarenakan dari 153 perusahaan manufaktur, terdapat 8 perusahaan yang mempunyai dewan direksi yang terkoneksi politik. Sedangkan sampel perusahaan yang memiliki dewan komisaris terkoneksi politik cukup banyak. Dari 459 observasi terdapat 174 observasi perusahaan memiliki dewan komisaris yang terkoneksi politik. Perusahaan yang mempunyai jumlah dewan komisaris paling tinggi yaitu Semen Indonesia (Persero) sebanyak 6 dewan komisaris yang terkoneksi politik pada tahun 2020.

Sedangkan jumlah dewan direksi yang tertinggi yaitu Gajah Tunggal Tbk sebanyak 2 dewan direksi pada tahun 2018-2020.

Ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur memiliki nilai rata-rata sekitar Rp28,53. Selain itu, rata-rata tingkat *leverage* perusahaan sampel yaitu 0,51. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset yang ada berasal dari pinjaman pihak ketiga. Selanjutnya hasil penelitian juga menemukan bahwa terdapat 33,98% perusahaan menggunakan jasa KAP *Big Four* sebagai auditor eksternalnya.

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji data sebelum masuk ke dalam tahap analisis uji hipotesis, meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil pengujian secara ringkas tersaji di tabel 4 berikut:

Tabel 4. Uji Asumsi Klasik

	ABCFO	ABDISEXP	ABPROD
Uji Normalitas (Prob. Jarque-Bera)	0,000 (Data berdistribusi tidak normal)	0,000 (Data berdistribusi tidak normal)	0,000 (Data berdistribusi tidak normal)
Uji Multikolinieritas (Nilai korelasi > 0,80)	Tidak terdapat multikolinieritas	Tidak terdapat multikolinieritas	Tidak terdapat multikolinieritas
Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)	Semua tidak signifikan	Semua tidak signifikan	Semua tidak signifikan
Uji Autokorelasi (nilai Durbin-Watson)	1,778 (Tidak ada autokorelasi)	1,585 (Tidak ada autokorelasi)	1,723 (Tidak ada autokorelasi)

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4, data penelitian ini lolos uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas, namun hasil pengujian normalitas menunjukkan data tidak terdistribusi normal karena Jarque-Bera memiliki nilai $p > 0,05$. Berdasarkan *Central Limit Theorem* jika semakin banyak data yang diambil dari populasi atau jumlah sampel penelitian >30 , maka distribusi sampel dapat dikatakan normal dan pengujian hipotesis dapat dilakukan (Nurudin *et al.*, 2014). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 153 dari populasi 191 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2018-2020 atau sebesar 80% dari populasi sehingga dengan data penelitian dapat dikatakan terdistribusi normal.

Tahap berikutnya yaitu uji estimasi regresi data panel, dengan melakukan Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Breusch-Pagan Langarange Multiplier (LM)*. Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa Random Effect Model (RE) adalah model yang tepat digunakan untuk semua pengujian hipotesis. Tabel 5 menyajikan ringkasan hasil uji hipotesis.

Tabel 5. Uji Hipotesis

Variabel Penelitian	ABCFO		ABDISEXP		ABPROD	
	Koefisien Regresi	Prob.	Koefisien Regresi	Prob.	Koefisien Regresi	Prob.
C	-2,094	0,042	3,102	0,008	-0,626	0,321
DD	0,188	0,431	0,130	0,425	0,196	0,427
DK	0,093	0,398	0,751	0,000	-0,838	0,007
UP	0,069	0,056	-0,111	0,007	0,019	0,344
KA	0,448	0,000	0,081	0,188	-0,172	0,105
LV	-0,249	0,021	0,045	0,302	0,338	0,003
TP	0,274	0,000	-0,137	0,000	0,104	0,018
R ²	0,088		0,105		0,041	
Adjusted R ²	0,076		0,039		0,028	
F-statistic	7,316	0,000	8,900	0,000	3,239	0,001

Deskripsi variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 5 dewan komisaris yang terkoneksi politik terbukti berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba riil yang diprosikan dengan *abnormal discretionary expense*. Semakin banyak jumlah dewan komisaris yang terkoneksi politik dalam perusahaan, maka semakin tinggi juga praktik manajemen laba riil yang dilakukan perusahaan melalui *abnormal discretionary expense*. Temuan ini mendukung H1a. Selain itu, pada pengukuran *abnormal production* juga terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba riil tetapi angka koefisien bernilai negatif. Semakin banyak jumlah dewan komisaris yang terkoneksi politik dalam perusahaan, semakin rendah praktik manajemen laba riil yang dilakukan perusahaan melalui *abnormal production*. Temuan ini berlawanan dengan H1a sehingga hipotesis tidak terdukung. Hipotesis ini juga tidak terdukung untuk hasil pengujian pengukuran *abnormal CFO*, dewan komisaris yang terkoneksi politik tidak terbukti berpengaruh terhadap praktik manajemen laba riil. Berbeda dengan, dewan direksi yang terkoneksi politik. Dalam penelitian ini, dewan yang terkoneksi politik terbukti tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba riil, baik menggunakan pengukuran *abnormal production*, *abnormal discretionary expense* ataupun *abnormal CFO* sehingga hipotesis H1b tidak terdukung.

Hasil uji t untuk variabel kontrol berupa ukuran perusahaan menunjukkan hasil yang berpengaruh negatif terhadap *abnormal discretionary expense*, namun tingkat leverage ditemukan bahwa berpengaruh positif terhadap *abnormal production* dan berpengaruh negatif terhadap *abnormal CFO*. Selain itu pada kualitas audit ditemukan berpengaruh positif terhadap *abnormal CFO*. Hal ini menjadi bukti bahwa kondisi pandemi *covid-19* dapat berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur.

PEMBAHASAN

Dewan Komisaris Terkoneksi Politik dan Manajemen Laba Riil

Penelitian merumuskan hipotesis pertama bagian a bahwa dewan komisaris yang terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba riil. Hasil penelitian membuktikan bahwa dewan komisaris terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba riil yang diprosikan dengan *abnormal discretionary expense*. Hal ini menunjukkan semakin banyak jumlah dewan komisaris yang terkoneksi politik dalam perusahaan, semakin tinggi juga praktik manajemen laba riil yang dilakukan perusahaan melalui *abnormal discretionary expense*.

Temuan tersebut mendukung teori agensi, dimana ketika dewan perusahaan terkoneksi politik akan mendorong terjadinya manajemen laba. Menurut Scott (1997) salah satu bentuk tindakan manajemen laba adalah *income maximization* yaitu memaksimalkan laba agar memperoleh bonus yang lebih besar dan tindakan tersebut dapat melindungi perusahaan dari perjanjian utang. Dengan demikian ada kemungkinan manajemen perusahaan memaksimalkan laba dengan mengurangi *discretionary expenses* seperti biaya penelitian dan pengembangan, biaya iklan, biaya penjualan, administrasi dan umum. Penelitian ini sejalan dengan Apriyani *et al.* (2013) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris yang terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN dan perusahaan swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris yang terkoneksi politik cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba melalui *abnormal discretionary expense*.

Dewan komisaris yang terkoneksi politik berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba riil yang diprosikan dengan *abnormal production*. Dewan komisaris yang terkoneksi politik justru terindikasi dapat mengurangi praktik manajemen laba melalui pengukuran *abnormal production*. Dengan adanya hasil tersebut, temuan ini tidak sejalan dengan teori agensi. Teori agensi memandang bahwa koneksi politik memiliki pengaruh negatif, yaitu dapat mendorong konflik agensi (Ling *et al.*, 2016). Namun, temuan tersebut justru sejalan dengan teori ketergantungan sumber daya. Teori tersebut menganggap dewan yang terkoneksi politik memiliki dampak positif untuk perusahaan (Supatmi *et al.*, 2021). Chaney *et al.* (2010) menyatakan perusahaan yang terkoneksi politik seharusnya dapat meminimalisir praktik

manajemen laba, karena perusahaan tersebut mendapatkan pengawasan ketat secara politisi. Penelitian ini sejalan dengan Matangkin & Mardiana (2018) semakin tinggi kemampuan dewan perusahaan dalam mengatur dan mengelola sumber daya perusahaan, maka praktik manajemen laba akan berkurang.

Dewan komisaris yang terkoneksi politik tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba riil yang diprosikan dengan *abnormal CFO*. Arus kas dari kegiatan operasi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dana (Gumanti *et al.*, 2015). Dimana jika arus kas perusahaan dari kegiatan operasi tinggi, maka dorongan untuk melakukan praktik manajemen laba akan menurun karena perusahaan dianggap mampu menghasilkan dana yang cukup sehingga perusahaan tidak perlu melakukan praktik manajemen laba. Sejalan dengan penelitian Puspitasari & Nugrahanti (2016) koneksi politik tidak berpengaruh terhadap manajemen laba melalui *abnormal CFO*. Terdapat dugaan bahwa dewan komisaris yang terkoneksi politik hanya berperan sebagai pengawas sehingga tidak berimbas pada kegiatan operasional. Selain itu dewan komisaris memiliki wewenang memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, adanya hal tersebut dewan komisaris yang terkoneksi politik diduga tidak banyak terlibat dalam kebijakan arus kas perusahaan.

Dewan Direksi Terkoneksi Politik dan Manajemen Laba

Penelitian merumuskan hipotesis pertama bagian b bahwa dewan direksi terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba riil. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dewan direksi terkoneksi politik tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba riil, baik menggunakan pengukuran *abnormal production*, *abnormal discretionary expense*, dan *abnormal cfo* dengan demikian hipotesis H1b ditolak. Hasil penelitian ini belum dapat membuktikan bahwa dewan direksi terkoneksi politik berpengaruh terhadap manajemen laba. Dewan direksi memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan karena bertindak sebagai pengambil keputusan yang menentukan masa depan perusahaan. Terdapat dugaan dewan direksi yang terkoneksi politik pada perusahaan manufaktur terindikasi hanya berperan sebagai perlindungan politik, sehingga tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, kegiatan operasional perusahaan seperti *operating cash flow*, *discretionary expense*, dan *production* memiliki pengawasan yang ketat, sehingga akan sulit untuk dilakukan manipulasi karena berkaitan langsung dengan operasional perusahaan. Ketidaksesuaian dengan hasil penelitian terdahulu diduga karena jumlah dewan terkoneksi politik dalam perusahaan manufaktur tergolong sedikit. Rata-rata jumlah dewan direksi terkoneksi politik hanya ada satu atau dua dalam perusahaan. Dari total 459 observasi dalam penelitian ini, yakni terdapat 25 dewan direksi yang terkoneksi politik. Selain itu, rendahnya jumlah dewan direksi yang terkoneksi politik maka juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan.

Penelitian terkait dengan manajemen laba riil di Indonesia masih sedikit dilakukan, karena perusahaan di Indonesia cenderung melakukan pada manajemen laba akrual. Sejalan dengan penelitian Antonius & Tampubolon (2019) bahwa koneksi politik tidak berpengaruh pada perusahaan manufaktur di Indonesia, hasil penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan terkoneksi politik atau tidak terkoneksi politik tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian Chaney *et al.* (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kualitas laba yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Hasil penelitian tersebut membuktikan perusahaan yang terkoneksi politik memiliki tujuan melakukan manajemen laba untuk membatasi tekanan pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris yang terkoneksi politik dalam perusahaan, semakin tinggi praktik manajemen laba riil yang dilakukan perusahaan melalui *abnormal discretionary expense* namun makin rendah praktik manajemen laba riil yang dilakukan perusahaan melalui *abnormal production*. Selanjutnya dewan komisaris yang terkoneksi politik tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba riil yang

diproksikkan dengan *abnormal CFO*. Sedangkan dewan direksi dalam penelitian ini ditemukan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, baik melalui pengukuran *abnormal production*, *abnormal discretionary expense*, ataupun *abnormal CFO*. Penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris terkait dengan teori agensi bahwa dewan yang terkoneksi politik berpengaruh terhadap praktik manajemen laba riil. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pengukuran dewan terkoneksi politik. Penelitian ini belum mempertimbangkan tingkat jabatan yang dipegang dewan selama menjabat anggota politik maupun jabatannya di perusahaan dan jumlah data terkait koneksi politik yang tergolong sedikit. Dengan demikian, penelitian ini belum menggambarkan tingkat dewan terkoneksi politik dalam perusahaan. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu memperpanjang periode penelitian agar jumlah dewan perusahaan yang terkoneksi politik menjadi lebih banyak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memisahkan kondisi sebelum dan selama pandemi *Covid-19*.

REFERENSI

- Agustia, D. (2013). Pengaruh faktor good corporate governance, free cash flow, dan leverage terhadap manajemen laba. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15(1), 27–42. <https://doi.org/10.9744/jak.15.1.27-42>
- Antonius, R., & Tampubolon, L. D. (2019). Analisis penghindaran pajak, beban pajak tangguhan, dan koneksi politik terhadap manajemen laba. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1(1), 39–52. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i1.5>
- Apriyani, Ika, S. R., & Sarnowo, H. (2013). Pengaruh koneksi politik dan corporate governance terhadap manajemen laba. *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 344–359. <https://doi.org/https://doi.org/10.36217/ier.v3i1.76>
- Attia, M. B. R., Lassoued, N., & Attia, A. (2016). Political costs and earnings management: evidence from Tunisia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 6(4), 388–407. <https://doi.org/10.1108/jaee-05-2013-0022>
- Braam, G., Nandy, M., Weitzel, U., & Lodh, S. (2015). Accrual-based and real earnings management and political connections. *International Journal of Accounting*, 50(2), 111–141. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2013.10.009>
- Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2010). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, 51(1-2), 58–76. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003>
- Faccio, M. (2006). Politically Connected Firms. *American Economic Review*, 10. <https://doi.org/DOI:10.1257/000282806776157704>
- Faccio, M., Masulis, R. W., & McConnell, J. J. (2006). Political connections and corporate bailouts. *Journal of Finance*, 61(6), 2597–2635. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.01000.x>
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh political connection, foreign activity, dan real earnings management terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601–1624. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9223>
- Fischer, M., & Rosenzweig, K. (1995). Attitudes of students and accounting practitioners concerning the ethical acceptability of earnings management. *Journal of Business Ethics*, 433–444. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF00872085>
- Fitiasari, Y., & Suwandi. (2020). Peran koneksi politik memperkuat hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. *Journal of Islamic Accounting and Tax*, 3(28), 17–35. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.986>
- Gerayli, M. S., Yanesari, A. M., & Ma'atoofi, A. R. (2011). Impact of audit quality on earnings management: Evidence from Iran. *International Research Journal of Finance and Economics*, 66, 77–84.
- Gumanti, T.A, Nastiti, A.S, Utami, E.S, & Manik, E. (2015). Audit quality and earnings management in Indonesian initial public offerings. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(5), 21–22. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5s5>
- Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017). Political connections and related party transactions: evidence from Indonesia. *International Journal of Accounting*, 52(1), 45–63.

- <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.01.004>
- Hendi, & Ningsih, I. P. W. (2019). Pengaruh koneksi politik dan transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Global Financial Accounting Journal*, 3(2).
- Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(1), 46–60. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art5>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Karina, R. (2020). Pengaruh karakteristik komite audit dan auditor eksternal terhadap praktik manajemen laba di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 22(2), 307–318. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29264/jfor.v22i2.7304>
- Ling, L., Zhou, X., Liang, Q., Song, P., & Zeng, H. (2016). Political connections, overinvestments and firm performance: Evidence from Chinese listed real estate firms. *Finance Research Letters*, 18, 328–333. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.05.009>
- Mahawyaharti, T., & Budiasih, G. N. (2016). Asimetri informasi, leverage, dan ukuran perusahaan pada manajemen laba. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(2), 100. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i02.p05>
- Matangkin, L., & Mardiana, A. (2018). Pengaruh kemampuan manajerial dan koneksi politik terhadap reaksi investor dengan kecurangan laporan keuangan sebagai variabel. *Jurnal Sistem Informasi, Manajemen Dan Akuntansi (SIMAK)*, 16(2), 181–208.
- Nurudin, M., Mara, M. N., & Kusnandar, D. (2014). Ukuran sampel dan distribusi sampling dari beberapa variabel random kontinu. *Buletin Ilmiah Mat. Stat. Dan Terapannya (Bimaster)*, 03(1), 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/bbimst.v3i01.4461>
- Puspitasari, A., & Nugrahanti, Y. W. (2016). Pengaruh hubungan politik, ukuran kap, dan audit tenure terhadap manajemen laba riil. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(1), 27–43. <https://doi.org/10.9744/jak.18.1.27-43>
- Putri, C. M., & Supatmi, S. (2020). Pengaruh dewan terkoneksi politik terhadap tingkat simpanan, tingkat kredit dan risiko kredit perbankan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 4(2), 158–168. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jppsh.v4i2.31587>
- Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. *Journal of Accounting and Economics*, 42, 335–370. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002>
- Scott, W. R. (1997). *Financial accounting theory*. Canada Prentice Hall.
- Sucipto, H., & Zulfa, U. (2021). Pengaruh good corporate governance, financial distress, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 4(1), 13–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.737>
- Sulistiyono, S. (2008). *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*. PT Grasindo.
- Sulistiyanto, H. S. (2008). *Manajemen laba teori & model empiris*. PT Grasindo.
- Supatmi. (2020). *Pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja perusahaan dengan koneksi politik sebagai pemoderasi (Disertasi yang tidak dipublikasikan)*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Supatmi, S., Sutrisno, S., Saraswati, E., & Purnomosidhi, B. (2021). Abnormal related party transactions, political connection, and firm value: Evidence from Indonesian firms. *International Journal of Business and Society*, 22(1), 461–478. <https://doi.org/10.33736/IJBS.3189.2021>
- Wareza, M. (2019). *Tiga tilar dan drama penggelembungan dana*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190329075353-17-63576/tiga-pilar-dan-drama-pengelembungan-dana>
- Wu, W., Wu, C., Zhou, C., & Wu, J. (2012). Political connections, tax benefits and firm performance: Evidence from China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(3), 277–300. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.005>

Wulandari, L. (2018). Pengaruh political connection pada dewan komisaris dan dewan direksi terhadap kinerja perusahaan sektor pertambangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1), 1196–1226.